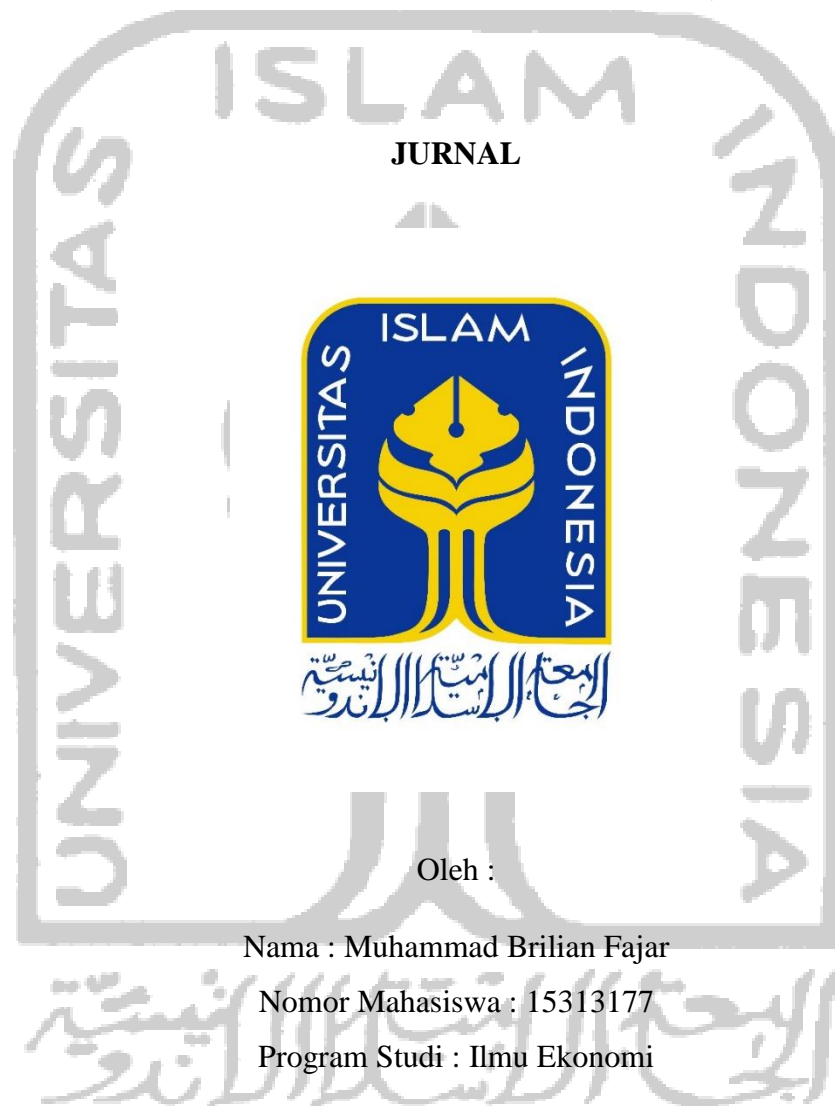


**ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS PUNGUTAN LIAR TERHADAP
ONGKOS ANGKUT TRANSPORTASI TRUK EKPEDISI BARANG (STUDI
KASUS PT. RODA MUSTIKA JAYA)**



Oleh :

Nama : Muhammad Brilian Fajar

Nomor Mahasiswa : 15313177

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

**ANALISIS PENGARUH AKTIVITAS PUNGUTAN LIAR TERHADAP ONGKOS
ANGKUT TRANSPORTASI TRUK EKPEDISI BARANG**

Nama : Muhammad Brilian Fajar
Nomor Mahasiswa : 15313177
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 19 Desember 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Eko Atmadji Dr .,S.E.,M.Ec

Analisis Pengaruh Aktivitas Pungutan Liar terhadap Ongkos Angkut Transportasi Truk Ekspedisi Barang (Study kasus PT. Roda Mustika Jaya)

Muhammad Brilian Fajar

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

E-mail: 15313177@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Aktivitas Pungutan Liar terhadap Ongkos Angkut Transportasi Truk Ekspedisi Barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas premanisme, ongkos angkut transportasi dan pendapatan supir terhadap kenaikan harga barang yang disebabkan adanya pungutan liar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana metode pengambilan data menggunakan teknik wawancara. Penelitian ini melibatkan beberapa responden diantaranya tiga orang karyawan, tujuh orang supir truk dan dua orang oknum pengambil pungutan liar. Uji keabsahan data dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Metode analisis data menggunakan metode fenomenologi dan metode pengujian data menggunakan triangulasi. Metode fenomenologi adalah metode yang menarik kesimpulan dengan melihat realitas dalam konteks asumsi responden. Metode pengujian triangulasi dilakukan untuk mencari kebenaran dengan memanfaatkan pendapat responden dua atau lebih.

Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa hal diantaranya : (1) Pungutan liar bukan merupakan faktor dari kerugian perusahaan sehingga naiknya suatu harga barang bukan berdasarkan dari aktivitas pungutan liar. (2) Keputusan supir dalam mengambil rute perjalanan yang membuat keterlambatan atas pengiriman barang, karena motif untuk memanfaatkan uang akomodasi pengiriman. (3) Adanya *Subordinasi* supir dalam memandang sebuah aturan didalam perusahaan sehingga supir mencari penghasilan tambahan. (4) Kerugian dari keterlambatan pengiriman membuat kurva pareto optimum bergeser ke kiri.

Kata Kunci: *Aktivitas Pungutan Liar, Ongkos Angkut, Perilaku Supir, Transportasi*

Ekpedisi Truk

PENDAHULUAN

Indonesia dengan negara penduduk terbanyak ke-empat di dunia versi bank dunia (United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision, 2019). Sumber daya alam dan manusia yang ada di Indonesia mampu menghadapi era ekonomi baru. Kerjasama antara negara bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan setiap masyarakat, namun masih banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Lapangan pekerjaan yang sangat minim membuat masyarakat yang belum masuk usia angkatan kerja harus mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun pendapatan perkapita Indonesia terbilang tinggi, masih banyaknya hasil sumber pendapatan yang dilakukan secara illegal dalam konteks perdagangan. Contoh sederhana seperti aktivitas pungutan liar yang sering terjadi di masyarakat. Motif di balik adanya aktivitas pungutan liar karena adanya kesempatan yang dibuka untuk beberapa oknum preman masuk ke suasana lingkungan sosial masyarakat.

Katinga, (2012) menyatakan pada tahun 2011 tercatat pungutan liar mencapai nominal 25 triliun dengan rata-rata pendapatan pertahunnya mencapai 27-30 triliun versi kementerian perindustrian. Porsi biaya pungutan liar terhadap biaya produksi perusahaan mencapai 20 persen sehingga perlu adanya biaya ekstra untuk memperlancar distribusi produksi. Imbas dari aktivitas pungutan liar membuat penalaran terhadap perilaku masyarakat. Perilaku ini memunculkan rasa malas, minimnya usaha dan menurunnya tingkat produktivitas masyarakat. Dampak makro dari aktivitas pungutan liar adalah penurunan kinerja perekonomian. Secara perhitungan matematis menjelaskan bahwa $P.MP_L = W$ yang artinya produktivitas akan menghasilkan upah sesuai kontribusi produktivitas yang dihasilkan.

Aktivitas pungutan liar dapat ditemukan dalam berbagai macam lokasi, kawasan atau tempat-tempat yang strategis. Ada beberapa pandangan bahwa aktivitas pungutan liar menurunkan keuntungan atau laba yang diperoleh dari hasil perdagangan, baik perseorangan maupun individu. Aktivitas pungutan liar dikuasai oleh beberapa oknum preman yang sengaja memanfaatkan fasilitas publik pemerintah dan adanya campur tangan ormas didalamnya. Menurut Purwadi, Rifki, Hadisaputra, Silviana, (2018) menyatakan bahwa ormas di Jawa Barat dapat bergerak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan pemerintah daerah dan juga banyak oknum perangkat-perangkat negara yang ikut serta atas organisasi illegal tersebut.

Pemanfaatan jabatan menjadi penyebab dari susahny jaringan kelompok premanisme dibrantas. Penyalahgunaan pekerjaan menjadi budaya selanjutnya yang tertanam di masyarakat selain budaya pungli. Segala tindakan kriminalitas yang terjadi sampai dengan terbentuknya seluruh jaringan premanisme yang melakukan aktivitas pungutan liar sebagai lahan keuntungan pribadi menjadi tugas pemerintah membangun mentalitas masyarakat menjadi lebih produktif sehingga pembagian kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

TINJAUAN LITERATURE

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2017) berjudul *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik* menunjukkan bahwa posisi masyarakat menjadi korban dari aktivitas pungutan liar, karena ketiadaan dari pengawasan hukum terhadap pungutan liar. Masyarakat tidak mempunyai akses untuk pengaduan kepada lembaga hukum yang kredibel sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap citra birokrat.

Menurut Wibawa Samudra, Arya Fauzi, Habibah Ainun, (2013) berjudul *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang I* menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan pada jembatan timbang dilakukan oleh DishubKomoninfo yaitu menerbitkan peraturan daerah terhadap pengendalian muatan barang truk agar tonase yang ditentukan tidak melebihi kapasitas. Bentuk pengawasan pungutan liar di jembatan timbang memasang CCTV agar pemantau secara visual dapat terlacak dengan baik terkait pemberian "mel" atau pungutan liar.

Menurut Sjafruddin A, Frazila R, Muhammad S, Tamin O (2009) berjudul *Pengaruh Muatan Truk berlebih terhadap Biaya Pemeliharaan Jalan* menunjukkan bahwa pulau jawa dan sumatra adalah kawasan yang sering dilewati oleh truk-truk dan intensitas mobilisasi hampir 90 persen. Dampaknya pemerintah harus mengeluarkan biaya tinggi dalam pemeliharaan jalan akibat muatan yang berlebih. Penambahan biaya pemeliharaan jalan diikuti adanya pungutan tidak resmi (Pungli) yang sering terjadi di jembatan timbang.

Menurut Budi (2018) berjudul *Pemberantasan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik dari Perspektif Sosiologi Hukum* menunjukkan problematika pungli dapat dilihat dari sisi hukum dan sosiologis. Kedua aspek tersebut menerangkan bahwa terdapat tujuan serta motif kejahatan terstrukturisasi dalam hal kecatatan budaya. Aspek hukum menjelaskan bahwa pungutan liar dianggap sebagai tindakan pidana korupsi dengan dasar asas legalitas dan asas main hakim sendiri, maksud dari kedua aspek tersebut bahwa pungutan secara ilegal ada motif dari main hakim sendiri terhadap perampasan hak ekonomi orang lain sehingga legalitas menjadi ilegalitas terhadap keabsahan hukum yang ada.

Menurut Bakaruddin, M. Fikry Hadi, dan Wawan Asnawi (2016) berjudul *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih Di Kab. Pelalawan Prov. Riau* menunjukkan bahwa pembuatan perda ditujukan untuk mengatasi kerusakan jalan akibat overload muatan truk dengan mengarahkan seluruh pengiriman melewati jembatan timbang terlebih dahulu agar bisa memonitoring dan meminimalisir tindakan pungutan liar. Namun belum ada jalan atau cara lain khusus penanggulang tersebut selain ditetapkannya perda. Berdasarkan penelitian Purwadi, Rifki M, Hadisaputra, Silviana L (2018) berjudul *The Involvement of Mass Organizations (Ormas) in Illegal Levies Practices in West Java* menunjukkan bahwa pergerakan ormas di wilayah jawa barat dalam mengatur pungutan liar sangat

terorganisir dengan masuk ke struktur pemerintahan serta organisasi massa tersebut memanfaatkan kelemahan peraturan daerah yang telah dibuat. Organisasi massa menutupi kecurangannya dengan motif sebagai petugas pariwisata dan kebudayaan dengan memberikan tiket-tiket palsu jika truk-truk pengiriman barang masuk ke wilayah tertentu.

Landasan Teori

Konsep Kesejahteraan Ekonomi. Berdasarkan konsep Pareto menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam pandangan ekonomi ketika kedua pelaku ekonomi yaitu konsumen dan produsen mendapatkan informasi yang sama dan juga sempurna. Kesejahteraan diartikan sebagai kedua individu memperoleh manfaat diantara keduanya tanpa ada yang harus dikorbankan. Konsep pareto terbagi menjadi dua adalah pareto optimum dan pareto improvement. Pareto optimum adalah kondisi kedua produsen saling bertukar manfaat dengan sumber daya manusia (*labour*) dan modal (*capital*) memproduksi dalam batasan kurva PPF (*Production Possibility Frontier*) atau memproduksi dengan mencapai skala maksimum. Berbeda dengan pareto improvement adalah kondisi kedua produsen memproduksi belum mencapai skala maksimum kurva PPF namun kedua produsen tersebut diberikan sumber daya *capital* dan *labour* untuk melakukan peningkatan produksi dengan mencapai skala maksimum kurva PPF atau mencapai pareto optimum Menurut Noor (2015) konsep pasar persaingan sempurna kesejahteraan seharusnya diserahkan kepada pasar dengan bebas, karena ideal dari terbentuknya pasar tidak diintervensi oleh pemerintah.

Konsep Pendapatan. Pendapatan adalah bentuk usaha dari terciptanya biaya kesempatan atau memaksimalkan utility yang dimiliki. Pendapatan berfungsi sebagai peningkatan taraf kehidupan individu sehingga terciptanya kebahagiaan sampai sejahtera. Secara teori pendapatan meningkat maka saving juga akan meningkat serta konsumsi menjadi meningkat. Namun pada realitasnya semua itu tergantung dari perilaku masyarakat atau individu dalam mengambil keputusan atas segala manfaat pendapatan yang diterima. Pendapatan dalam ruang lingkup mikro terdapat kedalam beberapa hubungan seperti produktivitas karyawan suatu perusahaan, pemanfaatan pendapatan yang dihasilkan, serta perilaku individu dalam memegang suatu harta yaitu pendapatan. Analisa pendapatan juga mempengaruhi kinerja dari perusahaan, karena perusahaan menentukan biaya untuk gaji karyawan dari biaya produksi ($TC = FC + VC$) maka pengaruhnya akan sangat signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Keuntungan perusahaan yang didapatkan biasanya didasari kepada besaran biaya pengeluaran perusahaan. Perhitungan keseimbangan pengeluaran biaya dengan pendapatan adalah Budget line ($M = P_x \cdot X + P_y \cdot Y$) \rightarrow (pendapatan = pengeluaran). Perhitungan dalam pemanfaatan kepuasan memakai kurva indifferent yang menjelaskan konsumen ingin membelanjakan pendapatan sesuai tingkat kepuasan. Keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhan sampai tingkat maksimum dibatasi dengan garis anggaran. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi budget line, yaitu efek substitusi (harga) dan efek pendapatan. Perubahan harga (*price effect*) memberi pengaruh negatif terhadap konsumsi sesuatu barang sebagaimana hukum permintaan. Sedangkan perubahan pendapatan konsumen (*income effect*) akan memberi pengaruh positif terhadap konsumsi sesuatu barang (pada tingkat harga tetap).

Pungutan Liar. Aktivitas pungutan liar adalah kegiatan pengambilan pajak tanpa ada manfaat yang didapat. Pungutan liar merugikan secara ekonomi, merusak secara budaya. Dampak ekonomis yang akan terjadi ialah kenaikan harga secara signifikan sehingga akhirnya konsumen yang akan terkena imbasnya. Pandangan perusahaan terhadap pungutan liar akan terjadi inefisiensi terhadap pengiriman. Secara perhitungan matematis bahwa biaya total yang dikeluarkan nantinya akan meningkat $TC (naik) = FC naik + VC/Q \rightarrow ATC(naik) = AFC naik + AVC$. Hal ini menyebabkan harga-harga barang akan meningkat. Harga-harga barang yang meningkat adalah cikal bakal terjadinya kesenjangan perekonomian, karena barang-barang yang dibeli tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh ($M = P_x \cdot X + P_y \cdot Y \rightarrow$ (pendapatan = pengeluaran). Aktivitas pungutan liar juga membuat supir-supir truk yang harus menanggung biaya tambahan yang tak terduga. Secara etis adanya pungutan liar adalah tanggung jawab daripada pihak perusahaan namun ada beberapa perusahaan yang sudah mengalokasikan dana tak terduga untuk aktivitas illegal tersebut. Dampak ekonomis secara makro ketika pungutan liar jika masih terus dibiarkan maka yang akan terjadi investasi asing langsung akan menurun dengan signifikan. Asumsi para investor dalam menanamkan modal asing ke Indonesia adalah untuk mencari keuntungan dan juga keamanan bahwa asset yang mereka tanamkan tidak mengalami kerugian akibat tindakan kriminalitas (pungli). pertambahan biaya produksi atau FC yang terus meningkat secara eksponensial membuat penurunan kepada daya beli masyarakat.

Transportasi. Transportasi adalah suatu pemindahan barang dari satu tempat ke tujuan tempat yang lain. Pemindahan barang kemudian diartikan sebagai perilaku ekonomi, karena barang-barang tersebut akan di distribusikan kepada konsumen. Transportasi merupakan fasilitas perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga ini menjadi biaya kesempatan bagi perusahaan (biaya eksplisit). Peningkatan laba perusahaan akibat dari pengiriman barang akan mempengaruhi total cost (TC) sehingga perusahaan akan meningkatkan pendapatannya dengan melakukan pola yang sama dengan memanfaatkan transportasi sebagai efisiensi waktu. Secara umum penjelasan tentang perolehan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan karena terjadi TC menurun = $FC (menurun) + VC/Q$, manfaat ialah pengiriman menjadi lebih cepat adapun biaya-biaya yang lain untuk pengiriman barang sudah termasuk kedalam fixed cost sehingga rata-rata biaya yang dikeluarkan $ATC (menurun) = AFC (menurun) + AVC$ yang menurun akibat minimnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini akan berdampak baik bagi barang-barang yang dikirimkan sehingga tidak perlu adanya kenaikan barang akibat dari kenaikan TC untuk hal yang tidak bermanfaat bagi perusahaan. Perspektif lain mengatakan keuntungan perusahaan dapat diperoleh melalui cara lain dengan menurunkan biaya produksi karyawan namun hal itu minim dilakukan karena melanggar norma dan nilai kemanusiaan, sehingga ekstrenalitas positif dari pemanfaatan transportasi untuk perekonomian baik untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Strategi yang difokuskan untuk penelitian ini adalah keakuratan asumsi responden terhadap kondisi lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisa setiap kejadian demi kejadian sehingga akhirnya muncul satu kebenaran atas apa yang terjadi.

Jenis dan Sumber Data. Keseluruhan dari jenis data penelitian ini adalah data primer. Data primer yang nanti dikumpul adalah pengamatan lapangan. Sumber data yang lain berasal dari perusahaan jasa pengiriman barang dan beberapa laporan yang terkait pada pengiriman.

Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian ini berada di daerah Serang-Banten tepatnya di perusahaan angkutan ekspedisi barang. PT. Roda Mustika Jaya. Tbk dan lokasi pengiriman berada di daerah sekitaran Jabodetabek.

Prosedur Pengumpulan Data. Pada penelitian ini terdapat (5) cara yang digunakan diantaranya : (1) **Dokumentasi** adalah proses pengumpulan data untuk merekam aktivitas pada jala Jabodetabek sebagai jalur pengiriman barang truk. (2) **Observasi lapangan**, proses yang dilakukan pada pengambilan data ikut terjun langsung dengan mencatat seluruh kegiatan. (3) **Studi kepustakaan** berupa proses pengumpulan referensi sebagai bahan kelengkapan penelitian yang dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. (4) **Penentuan lokasi penelitian**, proses pemilihan lokasi sebagai bahan dari pengumpulan data berdasarkan studi kasus serta kesesuaian judul yang diambil. (5) **Wawancara** berupa proses pengambilan data berdasarkan pendapat narasumber dengan melihat kejadian yang ada.

Respoden Penelitian. Responden daripada penelitian ini terdiri dari tujuh orang supir, tiga orang dari pihak perusahaan dan sisanya dua orang oknum pengambil pungutan liar.

Periode Pungumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan selama 14 hari dan pengumpulan data juga di klasifikasikan menurut hari yaitu *weekdays* atau *weekend*. Kondisi hari mempengaruhi dari adanya aktivitas pungutan liar dan biasanya perusahaan yang bekerja sama dengan PT.Roda Mustika jaya Tbk. tidak melakukan pengiriman di hari libur atau tidak sebanyak aktivitas pengiriman di hari biasa.

Unit Analisis. Unit analisis dalam penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana pengaruh dari aktivitas pungutan liar ditengah masyarakat. Aktivitas pungutan liar terjadi akibat ketidakmampuan dalam mencari pekerjaan legal serta adanya kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi secara illegal di kawasan Jabodetabek.

Teknik Analisis Data. Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk melihat proses kejadian secara keseluruhan diantara : (1) Pendekatan secara teori, (2) Menganalisis realitas di lapangan, (3) Penarikan kesimpulan fakta baru diluar teori.

Metode Penelitian. Metode dari analisis penelitian menggunakan metode fenomenologi mendalami fakta yang terjadi di lapangan dengan perspektif responden. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi yaitu dengan mencari dua responden atau lebih lalu dikembangkan melalui perbandingan pendapat.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum tentang Pungutan Liar pada Angkutan Barang Merak-Jabodetabek

Aktivitas pungutan liar terjadi di kawasan Merak-Jabodetabek tidak hanya diluar kawasan industri tetapi aktivitas tersebut terdapa didalam kawasan indutri. . Pelabuhan Merak adalah salah satu kawasan pengiriman dan penerimaan barang untuk akses Sumatra dan Jawa. Aktivitas pungutan liar terjadi akibat adanya penguasaan dari oknum-oknum preman yang menguasai suatu daerah. Dampaknya terjadi adanya pembesaran biaya ongkos angkutan, namun di sisi lain kawasan Serang-Cilegon sebagai kawasan padat industri sudah merasakan kenyamanan dengan kondisi tersebut. Artinya bahwa aktivitas pungutan liar sudah menjadi hal lazim di masyarakat. Fungsi lain dari adanya aktivitas pungutan liar untuk mempermudah birokrasi di pemerintah, seperti ketika melakukan penimbangan di jembatan timbang. Adanya kerjasama supir dengan petugas agar muatan yang berlebih tidak terkena sanksi.

Pandangan Pungutan Liar terhadap Pengusaha

Perusahaan sebelum melakukan pengiriman menyiapkan uang akomodasi untuk menanggulangi adanya pungutan liar. Namun pengiriman selalu mengalami keterlambatan sampai ke pelanggan.

“Pungutan Liar dijalanan membuat jalur lalu lintas menjadi macet, tidak sedikit mobil-mobil truk yang membuat pengiriman selalu telat. Lingkungan perusahaan juga menjadi faktor selanjutnya pengiriman menjadi terlambat, karena pendataan akhirnya tidak berguna akibat supir-supir yang tidak mau menunggu dan ingin cepat selesai dalam proses pembuatan surat sampai memuat barang” (Wawan Sutanto, 10/11/2019, 09.37 WIB)

Adanya aktor informal yang memainkan peran penting untuk membuka akses preman-preman masuk kedalam perusahaan. Pengamatan selanjutnya ditemukannya karyawan-karyawan yang tidak memakai tanda pengenal. Karyawan-karyawan illegal ini bertugas sebagai pencatat administrasi.

...” untuk di perusahaan ini mas, preman-preman itu bisa masuk adalah hasil cabutan karyawan yang mengizinkan untuk masuk perusahaan, namun pihak-pihak yang menjadi cabutan ini bersifat tidak menetap, tetapi hal ini merugikan perusahaan secara keseluruhan, mulai dari barang masuk sampai kepada pengiriman. Pihak tersebut juga digaji sebagaimana karyawan biasa” (Suranta, 10/11/2019, 12.45 WIB)

Pihak perusahaan membuat peraturan dalam pengiriman agar meminimalisir terjadinya pungutan liar yang ada dijalanan maupun di berbagai tempat sehingga letak-letak serta lokasi sudah menjadi perhitungan bagi pihak perusahaan

“Sebenarnya pihak perusahaan sudah memperhitungkan dimana letak-letak pungutan atau orang yang meminta mel dijalan, secara perhitungan perusahaan biaya

tersebut masih di garis batas wajar, kami menerapkan bahwa seluruh supir wajib tanpa terkecuali harus melewati tol, karena target pengiriman sudah tercantum dalam laporan perusahaan dan perhitungan kami barang tersebut akan sampai tepat waktu jika pengiriman melewati jalur yang ditentukan perusahaan” (Harry, 10/11/2019, 10.23 WIB)

Pandangan Supir terhadap Pungutan Liar

Tanggapan supir tentang aktivitas pungutan liar mayoritas tidak merasa terganggu. Penyebabnya adalah kenyamanan supir-supir truk terhadap fenomena ini. Besaran yang biasanya diberikan sebesar Rp 2.000-5.000. Hal itu yang membuat supir tidak merasa keberatan adalah perusahaan yang menanggung biaya pengiriman barang.

“Oh itu karena om menghindari dari adanya pungutan liar atau orang yang minta mel, karena banyak banget tuh anak-anak muda yang maintain uang, kalau pungli sebenarnya dimana-mana juga ada, malah di pelabuhan lebih galak lagi” (Suroso, 11/11/2019, 07.28 WIB).

Disamping adanya pungutan liar dalam pengiriman, hal tersebut yang kemudian menentukan keputusan supir untuk memanfaatkan uang akomodasi pengiriman dan mencari tambahan penghasil diluar dari perusahaan.

“Wah kalau mereka sableng kelakuan mereka ada-ada, mereka yo kerjanya ngurangi muatan sering, jualan peralatan mobil, kadang juga kasbon terus makannya ga cukup-cukup gajinya, kesalahan supir tuh sebenarnya sepele tapi sering banget ketahuan judi di pabrik, ngerokok dan akhirnya kena denda” (Suroto, 11/11/2019, 22.14 WIB)

Aktivitas pungutan liar membuat keputusan supir untuk memilih melintasi jalan biasa, karena pertimbangan biaya yang murah daripada jalan tol

“Kita sekarang lewat jalan biasa mas, karena kalau lewat jalan biasa sisanya lumayan buat makan sama keperluan rokok ngopi mas” (Solihin, 12/11/2019, 10.36 WIB)

Tanggapan supir terhadap adanya pungutan liar tidak merasa keberatan dan tidak terganggu dengan banyaknya oknum-oknum yang meminta di jalanan

“Selama perusahaan masih menanggung ongkos angkut, pungutan liar bukan menjadi masalah yang besar buat saya toh juga uang yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Kadang kalau kita ga kasih malah jadi masalah baru dan barang telat sampainya” (Haerudin, 13/11/2019, 09.56 WIB)

“Sebenarnya kita ga bisa lepas dari namanya pungli sih mas, karena untuk melakukan pengiriman supir-supir itu bayar kepada oknum pengurus perusahaan agar proses pengerjaan surat ijin bisa diselesaikan dengan cepat. Selagi supir-supir merasa bahwa tindakannya baik-baik saja, saya yakin tidak akan yang mempermasalahkan itu” (Hidayat, 13/11/2019, 23.12 WIB).

Jalan biasa menjadi jalan yang sering dilewati oleh supir sehingga banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut sebagai lahan pekerjaan dan supir tidak merasa keberatan dengan aktivitas pungutan liar

“Mungkin ada kali lebih 10 kali kasih. Mending *ngasih* biayanya yang dikeluarin *ndak* terlalu besar ketimbang lewat tol, belum biaya bensin, biaya ke setiap pintu tol. Kalau lewat jalan biasa ga perlu lagi bayar uang tol segala macem” (Sunarto, 14/11/2019, 11.26 WIB).

Keputusan supir untuk lewat akses jalan biasa membuat setiap pengiriman mengalami keterlambatan.

“Kalau telat sering karena supir-supir biasanya kebanyakan istirahat belum lagi kena macet, kadang bisa sampe 3 sore baru nyampe” (Suherman, 15/11/2019, 10.47 WIB).

Pandangan Oknum terhadap Pungutan Liar.

Pungutan Liar dalam pandangan oknum dianggap sebagai lahan pekerjaan. Oknum-oknum yang ikut kedalam kelompok tersebut rata-rata tidak memiliki keahlian dibidang apapun. Di sisi lain pendapatan yang dihasilkan tidak begitu banyak karena hasil dari operasi nantinya harus di setor kepada ketua kelompok tersebut.

“Ahh kalau itu sekasihnya aja tapi biasanya sih dapatnya kadang-kadang 2000-5000, ada juga yang *ngasih* rokok gitu macem-macem” (Hendi, 10/11/2019, 14.00 WIB)

Pungutan Liar tidak hanya beroperasi di jalanan namun pelabuhan menjadi tempat strategis selain daripada persimpangan jalan dan lain-lain. Penentuan daerah kekuasaan biasanya adalah hasil diskusi dari masing-masing tiap kelompok preman, baik di jalanan maupun sampai pelabuhan.

“Sebelumnya udah ada kesepakatan dulu bagi ketua-ketua terus ditentukan dah mana aja yang boleh mana yang *ngga* intinya pembagian dah selesai dan dapat semua” (Rayhan, 11/11/2019, 13.02 WIB).

Interpretasi Hasil

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa pandangan yang sama dalam menyikapi pungutan liar. Ketiganya berasumsi bahwa aktivitas pungutan liar menjadi lahan bisnis untuk oknum-oknum. Supir tidak mempunyai masalah dengan aktivitas pungutan liar, karena secara keseluruhan biaya sudah menjadi tanggungan perusahaan. Ketidakberatannya supir terhadap masalah pungutan liar didasari keputusan supir untuk mengambil rute pengiriman yang dimana rute tersebut adalah jalan biasa terdapat banyak aktivitas pungutan liar.

Permasalahan utama yang menjadi kendala perusahaan adalah perilaku supir sehingga keterlambatan atas waktu pengiriman menjadi terganggu. Pada saat perusahaan mengalami keterlambatan pelanggan akan melayangkan surat klaim yaitu denda bagi perusahaan yang tidak mencapai target sesuai kesepakatan. Sering kalinya supir melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri.

Kerugian yang sangat besar dalam suatu pengiriman barang adalah mengatasi perilaku supir. Perilaku supir dalam mengambil rute jalan, mengambil sumber pendapatan diluar pendapatan asli supir dan perilaku supir dalam memanfaatkan pendapatannya. Kontribusi terbesar lagi-lagi terletak pada pengiriman yang terlambat akibat kelalaian supir. Secara hitung-hitungan waktu ketika supir mengambil jalan biasa waktu yang digunakan menjadi 2 kali lipat dari jarak tempuh melewati jalan tol. Misalnya jarak tempuh dari Serang-Tanjung Priok dapat ditempuh dengan waktu 3.30 menit menggunakan jalan tol namun ketika menggunakan jalan biasa maka waktu yang akan ditempuh akan lebih besar 2 kali lipat yaitu sebesar 7 jam.

Supir akan rela menempuh waktu cukup jauh untuk mendapatkan sisa uang akomodasi. Rata-rata keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp 600.000, hal ini didasarkan pada keseluruhan total pungutan liar, uang bensin, uang makan dan lain-lain. Gambaran teori pareto optimum kemudian bergeser ke kiri akibat pungutan liar dan perilaku supir dalam pemanfaatan jalan untuk pengiriman. Kondisi ini yang kemudian menjadi dilema perusahaan dalam mengatur keuangan untuk supir. Dalam hal ini supir lebih memilih bekerja secara ringan dan santai ketimbang harus mematuhi aturan perusahaan. Di sisi lain penghasilan yang didapat dari berbagai sumber penghasilannya kemudian tidak dimanfaatkan secara baik oleh para supir. Sisa uang akomodasi dan pendapatan yang lainnya kemudian digunakan untuk bersenang-senang ketimbang mereka menabung untuk keperluan sehari-harinya.

KESIMPULAN

Aktivitas pungutan liar bukan penyebab atas kerugian perusahaan. Kerugian terbesar perusahaan angkutan terletak pada kelalaian supir saat membawa barang karena sering terjadinya barang yang hilang, tindakan kriminalitas supir dengan cara mengurangi muatan barang dan terakhir keterlembatan pengiriman. Rute pengiriman melalui jalan biasa dianggap lebih murah daripada rute jalan tol. Mayoritas supir mengambil keputusannya untuk melewati jalan biasa karena uang akomodasi yang diberikan kepada supir sebesar 30 persen sampai 50 persen dari total tagihan.

Pandangan lain terlihat ketika aktivitas pungutan liar di malam hari. Oknum-oknum penarik pungutan liar semakin bebas untuk melakukan aktivitasnya bahkan preman-preman tersebut akan menjadi kriminal ketika tariff yang diberikan oleh supir tidak memenuhi standar mereka. Hasil yang ditemukan bahwa supir memiliki sumber pendapatan yang cukup banyak mulai dari sumber pendapatan yang legal sampai illegal. Hal itu disebabkan pola konsumsi supir yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik pendapatan yang didapatkannya.

IMPLIKASI

Efek dari perilaku supir yang berkepanjangan menyebabkan pemborosan waktu pengiriman atau inefisiensi pengiriman. Efek negatif yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah penurunan keuntungan. Akibat dari ketidakpercayaan pelanggan terhadap perusahaan jasa angkutan ekspedisi. Pemerintah saat ini masih kesulitan untuk

mengurangi aktivitas pungutan liar di jalan biasa. Karena terdapat hubungan mutualisme atau saling menguntungkan antara supir dan pihak pemungut pungutan liar.

